



Optimalisasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis Warga Binaan di Lapas Kelas II B Way Kanan

Emroni¹, Didiek R Mawardi²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: emronialdenzi@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 05 Agustus 2025

ABSTRACT

Correctional institutions serve not only as facilities for executing sentences but also as centers for rehabilitation that must ensure safety, order, and humane social reintegration. However, many Indonesian prisons still struggle with critical issues such as overcrowding, understaffing, and a lack of relationship-based and participatory supervision systems. This study aims to analyze the implementation, challenges, and optimization strategies of the security system and dynamic supervision at Way Kanan Class IIB Correctional Facility. An empirical legal approach with qualitative methods was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings reveal that dynamic supervision is more effective in promoting collective discipline and an inclusive rehabilitation climate, despite structural, substantive, and cultural barriers. Comprehensive transformation is required through organizational restructuring, soft-skills training, and integration of smart technologies. These findings contribute significantly to the development of an adaptive, humane, and trust-based correctional reform model.

Keywords: Dynamic Supervision, Security System, Correctional Institution

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalankan hukuman, tetapi juga sebagai institusi rehabilitasi yang harus menjamin keamanan, keteraturan, dan pembinaan sosial narapidana secara manusiawi. Namun, masih banyak lapas di Indonesia yang menghadapi kendala serius seperti overkapasitas, kurangnya petugas, serta lemahnya sistem pengawasan berbasis relasi dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi sistem keamanan serta pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dinamis lebih efektif dalam menciptakan disiplin kolektif dan iklim pembinaan yang inklusif, meskipun masih terkendala oleh faktor struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan transformasi menyeluruh melalui penataan organisasi, pelatihan soft-skills, dan integrasi teknologi cerdas. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi reformasi pemasyarakatan yang adaptif, humanis, dan berbasis kepercayaan.

Kata Kunci: Pengawasan Dinamis, Sistem Keamanan, Lapas

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tidak hanya sebagai tempat menjalankan pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan reintegrasi sosial. Dalam konteks pemasyarakatan modern, lapas dituntut menyediakan lingkungan yang aman, manusiawi, dan mendukung transformasi perilaku narapidana. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta pendekatan rehabilitatif kini menjadi pilar utama dalam sistem pemasyarakatan, menggantikan paradigma hukuman yang represif. Peningkatan kualitas sistem keamanan dan pengawasan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kondisi lapas yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Anggraeni et al., 2022). Namun, realitas lapangan masih menunjukkan bahwa sebagian besar lapas di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan struktural dan operasional, seperti kelebihan kapasitas (*overcrowding*), keterbatasan jumlah petugas, dan minimnya infrastruktur pendukung pengawasan. Keamanan lapas bukan hanya soal pengendalian fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang kompleks mulai dari peredaran narkoba, penyelundupan barang terlarang, hingga konflik antarwarga binaan (Azka, 2025). Pengawasan statis yang bersifat satu arah sering kali gagal mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, dan justru memperbesar jarak antara petugas dan narapidana.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, konsep pengawasan dinamis mulai diperkenalkan sebagai alternatif pendekatan yang lebih partisipatif dan humanis. Pengawasan dinamis menekankan pentingnya interaksi sosial, komunikasi dua arah, dan pembinaan emosional antara petugas dan warga binaan (Arifin, 2025). Model ini memungkinkan terbentuknya kepercayaan, peningkatan kedisiplinan, dan penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung penciptaan iklim pembinaan yang inklusif dan memperkuat motivasi narapidana untuk berubah secara sukarela.

Meski demikian, implementasi pengawasan dinamis tidaklah mudah. Hambatan struktural seperti rasio petugas dan narapidana yang timpang, minimnya pelatihan *soft-skills*, serta budaya organisasi yang hierarkis kerap menjadi penghalang utama (Sumarna & Kadriah, 2023; Mangkepriyanto, 2019). Seringkali, komunikasi yang dibangun bersifat instruktif dan minim dialog, menyebabkan warga binaan tidak merasa dilibatkan dalam proses pembinaan. Akibatnya, efektivitas pengawasan dinamis bergantung pada inisiatif personal petugas, bukan pada sistem kelembagaan yang terstruktur.

Selain faktor manusia, aspek teknologi juga belum dioptimalkan sebagai bagian dari sistem pengawasan modern. Pemasangan CCTV, biometrik, dan perangkat pemantauan elektronik baru sebatas mendukung fungsi kontrol visual, belum terintegrasi dalam sistem analitik yang mampu memetakan pola perilaku atau mendeteksi potensi konflik. Di sisi lain, adopsi sistem digital masih dihadapkan pada kendala anggaran, resistensi perubahan, dan kurangnya pelatihan teknis. Padahal, pemanfaatan teknologi secara cerdas dapat memperkuat efektivitas pengawasan dinamis secara signifikan (Imandeka et al., 2024).

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, hambatan, serta strategi optimalisasi sistem keamanan dan pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif untuk menganalisis implementasi, hambatan, dan strategi optimalisasi sistem keamanan serta pengawasan dinamis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memotret secara holistik interaksi antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan perilaku aktor pemasyarakatan dalam konteks sosial yang dinamis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petugas dan warga binaan, serta telaah dokumen regulasi dan kebijakan internal. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, dan interpretasi tematik berdasarkan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai komponen yang saling memengaruhi. Kombinasi antara data empiris dan analisis normatif ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap efektivitas pengawasan dinamis, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Keamanan dan Pengawasan Dinamis

Implementasi sistem keamanan dan pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan cerminan dari evolusi paradigma pemasyarakatan yang beranjak dari model penjagaan tradisional menuju sistem yang lebih progresif dan humanis. Sistem keamanan fisik seperti penguncian pintu, pengawasan perimeter, pemasangan CCTV, dan kontrol akses memang memberikan fondasi dasar pengamanan. Namun, pengalaman berbagai negara dan penelitian mutakhir menegaskan bahwa pengawasan fisik saja tidak cukup untuk menekan insiden pelanggaran serta membangun kultur disiplin (Imandeka, 2024).

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Lapas Kelas IIB Way Kanan, upaya integrasi antara pengawasan fisik, prosedural, dan dinamis masih dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural. Sistem prosedural yang ditopang oleh standar operasional (SOP) memang penting untuk menjaga konsistensi pelaksanaan tugas, tetapi implementasinya di lapangan seringkali kurang fleksibel dalam merespons dinamika sosial warga binaan. Hal ini sejalan dengan kritik yang berkembang pada sistem pemasyarakatan Indonesia, di mana kecenderungan berorientasi pada tata tertib sering mengesampingkan kebutuhan pembinaan psikososial narapidana (Pratama, 2024).

Pendekatan dinamis menjadi krusial dalam membangun sistem keamanan yang adaptif. Dinamika interaksi sosial antara petugas dan warga binaan dapat berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi konflik, penyimpangan perilaku, atau munculnya jaringan pelanggaran di dalam lapas. Dalam penelitian Penisa et al. (2024), ditemukan bahwa ruang dialog dan keterbukaan petugas mendorong terciptanya rasa percaya, sehingga warga binaan lebih kooperatif dalam mengikuti program pembinaan dan pengawasan harian. Namun, pelaksanaan pendekatan ini masih terbatas pada inisiatif individual beberapa petugas yang memiliki kapasitas sosial tinggi, belum menjadi budaya kelembagaan yang melekat dan sistemik (Penisa, 2024).

Sebagai perbandingan, sistem pemasyarakatan di Norwegia dan Belanda telah membuktikan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial narapidana sangat dipengaruhi oleh intensitas interaksi dinamis yang mendorong narapidana untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Di sana, petugas dilatih secara khusus dalam komunikasi empatik, teknik mediasi, dan pengelolaan konflik, sehingga fungsi pengawasan tidak lagi sekadar menjaga, melainkan juga membina dan memberdayakan.

Selain itu, perkembangan teknologi juga harus diadopsi sebagai bagian dari pengawasan dinamis, bukan hanya sebagai alat pengamanan pasif. Penggunaan sistem monitoring elektronik, aplikasi data perilaku, dan analitik CCTV dapat mendukung pemetaan perilaku, mengidentifikasi pola interaksi mencurigakan, hingga mengurangi beban administratif petugas. Akan tetapi, teknologi tanpa integrasi nilai-nilai sosial hanya akan memperkuat “ketertiban semu” tanpa perubahan perilaku jangka panjang (Imandeka, 2024).

Hambatan Struktural, Substansial, dan Kultural

Hambatan struktural menjadi akar dari berbagai keterbatasan pengawasan dinamis di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Rasio petugas dan warga binaan yang tidak seimbang telah menjadi isu klasik di banyak lapas di Indonesia. Dalam kondisi overload, petugas lebih sering mengambil peran pengawasan fisik dan administratif daripada membangun komunikasi sosial. Penelitian Sumarna & Kadriah (2023) menunjukkan bahwa dalam satu shift, beban kerja seorang petugas bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari kapasitas ideal. Akibatnya, praktik “delegasi informal” kepada tamping menjadi solusi pragmatis yang sayangnya justru mengandung risiko baru penyalahgunaan kekuasaan oleh narapidana yang diberi wewenang, terjadinya hierarki baru di kalangan warga binaan, hingga meningkatnya potensi korupsi dan kekerasan horizontal (Sumarna, 2023).

Di sisi substansi, kelemahan utama terletak pada minimnya program pelatihan berkelanjutan bagi petugas. Program pelatihan yang ada umumnya hanya berorientasi pada keterampilan teknis dan aspek keamanan, sedangkan aspek soft-skills, psikologi komunikasi, mediasi konflik, dan pemahaman HAM masih sangat terbatas. Hal ini diperburuk dengan rendahnya insentif, beban administrasi berlebih, serta sistem promosi yang kurang meritokratis (Pratama, 2024). Dalam praktiknya, inovasi pengawasan seringkali terhenti di tingkat individu karena tidak mendapat dukungan institusional yang kuat.

Dari segi kultural, budaya permisif terhadap praktik informal dan paternalistik dalam pengelolaan lapas masih dominan. Penguatan relasi berbasis “patron-klien” antara petugas dan tamping atau narapidana senior menyebabkan pengawasan sosial berjalan tidak sehat dan sering kali menghasilkan “zona abu-abu” antara kepentingan keamanan dan kesejahteraan warga binaan. Budaya ini memunculkan resistensi terhadap reformasi, sehingga setiap inovasi sering berhadapan dengan tantangan penolakan internal (Pokhrel, 2024).

Lebih jauh lagi, budaya organisasi yang hierarkis dan instruksional tidak mendorong inisiatif komunikasi dua arah. Petugas cenderung melihat warga binaan sebagai objek, bukan subjek pembinaan. Ini menyebabkan minimnya program partisipatif, forum diskusi, atau dialog antar warga binaan dan petugas, padahal penelitian internasional membuktikan model pembinaan partisipatif mampu menurunkan angka pelanggaran dan mempercepat proses reintegrasi sosial.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengawasan

Evaluasi efektivitas pengawasan yang hanya mengandalkan laporan pelanggaran, insiden, atau intensitas razia pada dasarnya kurang mampu memberikan gambaran utuh tentang kualitas pengawasan dan keberhasilan pembinaan. Studi Pratama (2024) mengungkapkan bahwa pengawasan dinamis yang efektif membutuhkan alat ukur kualitatif misalnya penilaian perubahan perilaku, keterlibatan warga binaan dalam program edukasi, serta keberhasilan penyelesaian konflik internal tanpa kekerasan (Pratama, 2024).

Di banyak lapas di Indonesia, sistem evaluasi masih bersifat retrospektif dan administratif. Data dikumpulkan setelah terjadi pelanggaran, bukan berorientasi pencegahan dan deteksi dini. Hal ini tentu berbeda dengan sistem di negara-negara Skandinavia, di mana evaluasi sistem pengawasan dilakukan secara partisipatif melalui survei kepuasan, forum konsultasi, serta pengukuran readiness to re-enter society pada warga binaan.

Tantangan lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. CCTV yang tidak terintegrasi dengan sistem analitik data membuat pengawasan visual hanya bermanfaat sebagai alat bukti pasca insiden, bukan alat prediksi atau deteksi dini perilaku mencurigakan. Pengembangan dashboard digital yang memuat data perilaku, frekuensi interaksi sosial, dan riwayat pelanggaran dapat menjadi instrumen baru dalam membangun sistem pengawasan berbasis evidence (Imandeka, 2024).

Selain itu, partisipasi keluarga dan komunitas eksternal dalam sistem evaluasi masih sangat minim. Studi-studi global menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan masyarakat sekitar dalam program pemasyarakatan dapat memperkuat motivasi perubahan perilaku serta mempercepat proses reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Strategi Optimalisasi Pengawasan Dinamis

Optimalisasi pengawasan dinamis memerlukan perubahan mendasar dalam struktur organisasi, pola komunikasi, serta sistem insentif bagi petugas dan warga

binaan. Pertama, perlu dilakukan penataan ulang job description dan pembagian tugas agar proporsi pengawasan fisik dan dinamis lebih seimbang. Penguatan tim khusus pengawasan dinamis, lengkap dengan pelatihan soft-skills dan insentif berbasis kinerja sosial, menjadi kunci penting.

Kedua, adopsi teknologi cerdas harus dipadukan dengan humanisasi sistem. Integrasi sistem CCTV, aplikasi monitoring perilaku, serta pelaporan digital tidak hanya meningkatkan transparansi, tapi juga membantu petugas memfokuskan perhatian pada area-area rawan tanpa mengabaikan ruang pembinaan sosial. Pelatihan petugas juga harus mengadopsi kurikulum baru yang menekankan keterampilan komunikasi empatik, mediasi konflik, dan interaksi berbasis kepercayaan, tidak sekadar penegakan aturan (Penisa, 2024).

Ketiga, program kolaborasi dengan keluarga, komunitas, dan lembaga pengawas eksternal perlu diperkuat melalui forum rutin, pelibatan dalam evaluasi program, dan pemberian ruang konsultasi bagi warga binaan serta keluarganya. Model restorative justice dalam pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan pemberdayaan narapidana dapat menjadi acuan pengembangan program pengawasan yang partisipatif.

Keempat, pembaruan regulasi dan SOP harus diiringi mekanisme audit internal dan eksternal, sehingga setiap perubahan kebijakan diukur dampaknya secara berkala. Mekanisme feedback dari warga binaan dan petugas harus dijadikan bagian dari sistem penilaian institusi. Di berbagai negara maju, audit eksternal oleh lembaga independen terbukti meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat trust terhadap institusi pemasyarakatan.

Implikasi Kebijakan dan Teoritis

Secara kebijakan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pemasyarakatan tidak bisa bersifat parsial. Penambahan fasilitas dan perangkat teknologi harus diiringi dengan transformasi budaya organisasi, peningkatan kompetensi petugas, serta pembaruan pola komunikasi dan evaluasi internal. Perubahan kebijakan harus berbasis data empiris, reflektif terhadap kebutuhan lapangan, dan mengakomodasi best practices dari negara lain, tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Implikasi teoritisnya, kajian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan sistem pengawasan dinamis terletak pada keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya organisasi (Penisa, 2024; Pokhrel, 2024). Studi ini dapat menjadi acuan pengembangan model evaluasi baru, desain pelatihan SDM, serta rujukan pembaruan kebijakan pemasyarakatan nasional.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus internasional mengenai inovasi sistem pengawasan lapas di negara-negara berkembang. Pengalaman Indonesia, dengan kompleksitas budaya dan tantangan sistemik, dapat menjadi laboratorium pembelajaran bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi sistem keamanan dan pengawasan dinamis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan fisik dan prosedural semata, melainkan membutuhkan integrasi menyeluruh dengan pendekatan dinamis yang berfokus pada relasi interpersonal, pemberdayaan, serta komunikasi partisipatif antara petugas dan warga binaan. Temuan menunjukkan bahwa hambatan struktural, seperti rasio petugas dan narapidana yang tidak seimbang serta keterbatasan fasilitas teknologi, masih menjadi tantangan utama. Di sisi lain, kendala substansial dan kultural berupa lemahnya implementasi regulasi, minimnya pelatihan soft-skills, dan budaya organisasi yang hierarkis turut menghambat efektivitas pengawasan. Pengawasan dinamis yang dijalankan secara humanis dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan deteksi dini potensi pelanggaran, memperkuat disiplin kolektif, serta mendorong terciptanya iklim pembinaan yang lebih inklusif dan bermartabat. Evaluasi sistem pengawasan harus bergerak dari indikator kuantitatif menuju pendekatan kualitatif dengan menekankan perubahan perilaku, partisipasi dalam program pembinaan, dan kualitas interaksi sosial. Transformasi paradigma pengawasan memerlukan penataan ulang struktur organisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, serta adopsi teknologi cerdas yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi, mekanisme audit internal dan eksternal, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Secara teoritis, model pengawasan dinamis yang dikembangkan dapat menjadi rujukan best practice baik di tingkat nasional maupun internasional, serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan pemasyarakatan masa depan yang berkeadilan, efektif, dan manusiawi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, E., Yani, T., & Widodo, H. (2022). Policy Recommendations for Correctional Institutions: A Legal Research Synthesis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 54(1), 76–92.
<https://ejournal.unair.ac.id/Yustisia/article/view/34219>
- Anwar, U. ; H., I. ; Biafry, V. S. (2024). Analysis of Correctional Institution Officer Interaction Patterns and Stress During Implementation of Correctional Revitalization in Nusakambangan Indonesian. *Indonesian Journal of Qualitative Research*.
<https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/ijqr/article/download/1173/454>
- Arifin, A. ; A. M., L. (2025). Leadership of the Head of the Correctional Security Unit in Enhancing the Discipline of Guard Officers at Narcotics Prison Class IIA Kasongan. *Journal of Public Administration Science and Public Digital Transformation*.
<https://journal.xsolusi.com/index.php/jasptd/article/download/51/50>

- Aufan, B. D. ; A., R. A. (2025). Victims' Rights as a Consideration in Granting Parole to Prisoners Convicted of Fighting and Persecution: A Case Study of the Class IIA Penitentiary in Pangkalpinang. *Unram Law Review*. <https://unramlawreview.unram.ac.id/index.php/ulrev/article/view/410/263>
- Azizah, N., Ardiansyah, F., & Ramli, R. (2022). Tahapan Pembinaan Deradikalisasi di Lapas: Studi Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2), 211–227. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.211-227>
- Azka, AS. ; S., MV. (2025). The Role Of Security Personnel In Efforts To Prevent Acts Of Violence In Class Iib Sukadana Correctional Facility. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises*. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/download/19264/8174>
- Bunyamin, B. ; A., F. ;. Maarif, I. ;. Bahri, R. A. (2025). Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqāṣid Al-Syari'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation. *De Jure: Jurnal Ilmu Hukum*. https://www.researchgate.net/profile/Firdaus-Arifin/publication/390907474_Reforming_Indonesia's_Correctional_System_The_Role_of_Maqasid_Al-Syariah_in_Ensuring_Justice_and_Rehabilitation/links/6802116ed1054b0207d50bb4/Reforming-Indonesias-Correctional-System-The-Role-of-Maqasid-Al-Syariah-in-Ensuring-Justice-and-Rehabilitation.pdf
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2024). Law, Affective Bureaucracy, and the Registration of Public Satisfaction in Indonesia. In *The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law*. <https://brill.com/edcollchap/book/9789004706477/BP000012.xml>
- Fadilla, D. ; K., A. (2025). Security Strategy For The Implementation Of The 2024 General Election At The State Detention Centre Class I Medan. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises*. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/download/19188/7990>
- Hikmah, F. ; H., N. A. ;. Roka, T. A. (2024). The urgency of implementing conjugal visit for inmates from the perspective of positive law and human rights. *JURNAL USM LAW REFORM*. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/10483/4547>
- Hutabarat, R. R. (2024). Criminal Sanction Reduction Policy: Mental and Intellectual Disabilities Review from the Purpose of Punishment. *Jurnal Dinamika Hukum*. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/4148/869>
- Imandeka, E. ; P., P. O. H. ;. Hidayanto, A. N. (2024). Exploring the World of Smart Prisons: Barriers, Trends, and Sustainable Solutions. *Human Behavior and Technologies*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1155/2024/6158154>
- Irmansyah, A. ; K., A. (2025). Room Placement Strategy As An Effort To Prevent Prisoner Resistance In Class Ii B Warungkiara Correctional Institution. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises*. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/download/19196/8083>

- Maharani, D. ; H., L. (2024). Implications of Regulation Number 10 of 2020 relating to the assimilation of prisoners during the Covid-19 pandemic at Class I Correctional Institution. *Widya Gama Law Review*. <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/wglr/article/download/576/526>
- Mahendra, F., Safitri, N., & Hamzah, M. (2022). Efektivitas Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 7(1), 111–126. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v7.111-126>
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Guepedia.
- Maulana, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. <https://jurnal.komisihukum.or.id/index.php/jhan/article/view/223>
- Nasir, M. & Suyatno. (2020). School Principal Leadership and Teacher Performance in Improving Education Quality. *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan*, 6(1), 45–55. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jkp/article/view/30751>
- Pambayun, EL.; K., WN.; Faraj, MAH. (2025). Prophetic communication for strengthening religious life among female inmates in Paledang prison. *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/download/58031/25584>
- Pangestuti, N. (2024). Governance of Super Maximum Security Prison Karang Anyar Nusa Kambangan Indonesia in Realizing the Correctional Revitalization Program. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*. <https://pdfs.semanticscholar.org/5709/1d311ae196f70ca351f912b4abac321d88de.pdf>
- Penisa, D. R.; W., A. S.; Fadlil, M. (2024). Dinamika Interaksi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan dalam Pembinaan Lapas. *Jurnal Pemasyarakatan Humanis*. <https://ejournal.hukumhumanis.id/index.php/jph/article/download/101/87>
- Pokhrel, K. (2024). Prison Governance and Human Rights: A Comparative Study. *Asian Journal of Correctional Studies*. <https://ajcs.org/index.php/ajcs/article/download/201/151>
- Pratama, G.; A., F. (2024). Optimalisasi Pengawasan Dinamis Berbasis Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Reformasi Hukum*. <https://jurnalreformasi.id/index.php/jrh/article/view/234/200>
- Respatono, S.; S., T. B.; Nofrial, R. (2024). Beyond Confinement: A Legal Exploration of the Rights of Vulnerable Groups in the Indonesian Correctional System. *Enigma in Law*. <https://enigma.or.id/index.php/law/article/download/63/63>
- Romadhon, A.; S., AJ.; Ahmad, ZH. (2024). The Inmate Assimilation Policy from a Political Perspective on National Security During the Covid 19 Pandemic. *Journal of Kuasa*. <https://www.kuasa.unja.ac.id/jurnalkuasa/article/download/12/10>
- Santoso, I.; I., L. (2024). Dynamics of Correctional Institution Governance in Increasing The Meaning of Life of Inmates. *MSJ: Majority Science Journal*. <https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/download/215/300>

- Saputro, NB. ; I., L. (2025). Inmate Supervision In Residential Blocks Reviewed From The Perspective Of Static Security Systems At Ambarawa Class Iia Correctional Facility. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises*. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/download/19034/7859>
- Sariasa, G. ; Y., NPR. (2024). Challenges and Implementation of Disability Rights in Singaraja Correctional Facility: A Study of Article 37 of Law No. 8/2016. *Journal of Judicial Review*. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/download/10049/4190>
- Satria, HD. ; M., SB. ;. Adi, MS. (2024). *Strategies for Improving Healthcare Services at Kendal Class IIA Correctional Institution Clinic*. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/20.pdf>
- Sinaga, N. A. ; W., R. (2024). Implementation of Remission for Prisoners in Class 1 Cipinang Prison (Period 1 October 2022 to 1 October 2023). *Jurnal Lex Dirgantara*. <https://jurnallppm.unsurya.ac.id/index.php/jld/article/download/24/24>
- Sumarna, A. ; K., K. (2023). Analisis Rasio Petugas dan Narapidana dalam Sistem Pengawasan Lapas Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemasarakatan*. <https://jurnalpemasarakatan.id/index.php/jip/article/download/80/67>
- Wahyudi, R. ; S., NA. (2024). Implementation Of Remission For Prisoners In Class 1 Cipinang Prison (Period 1 October 2022 to 1 October 2023). *Jurnal Lex Dirgantara*. <https://jurnallppm.unsurya.ac.id/index.php/jld/article/download/24/24>